

## ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki potensi akan kekayaan sumber daya alamnya selain minyak potensi besar lain yang dimiliki Indonesia adalah batubara. di dalam kegiatan pertambangan, batubara menghasilkan limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan, melihat hal itu maka perlu adanya pengaturan yang dapat menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran baik perorangan maupun berbadan hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kasus PT.Nuryeni di kota Purwakarta dan Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan PT.Nuryeni. Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis normatif kualitatif. Teknik pengumpulan yaitu menggunakan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet. Kesimpulan penelitian adalah 1) Sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Selain itu adanya PERMA Nomor 13 tahun 2016 pasal 3 selaras dengan UUPPLH pasal 116 jo 117 perlu diingat kembali bahwa hakim dalam melaksanakan putusan haruslah berpijak pada UUPPLH sehingga dalam hal terjadinya pencemaran baik pelaku adalah korporasi maupun perorangan telah diatur dalam UUPPLH secara tegas. jadi diharapkan sanksi tersebut dapat seimbang dengan dampak maupun kerugian yang diderita akibat pencemaran yang dilakukan. Dalam kasus ini PT.Nuryeni hanya diberikan sanksi berupa denda Rp.150.000.000,00- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). 2) adapun pertanggungjawaban berdasarkan Vicarious Liability yang diterapkan terhadap korporasi dimana yang menjadi terdakwa adalah orang yang untuk atau atas nama mewakili Perusahaan yang melakukan pencemaran, dalam kasus ini Usan Samsudin selaku direktur PT. Nuryeni secara sah terbukti dengan sengaja melakukan dumping limbah kearea public tanpa adanya izin sehingga PT. Nuryeni dikenai sanksi paksaan berupa pembuatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk menyimpan limbah dan dilakukan remediasi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran , Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

## ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that have the potential for the wealth of its natural resources in addition to other large potential oil that Indonesia has is coal. In mining activities, coal produces hazardous waste that is harmful to the environment, seeing that it is necessary to have a regulation that can guarantee the preservation of environmental functions that can provide a deterrent effect for perpetrators of pollution, both individuals and legal entities. The purpose of this research is to find out how law enforcement in the case of PT. Nuryeni in the city of Purwakarta and to find out what efforts can be done to tackle the problem of environmental pollution carried out by PT. Nuryeni. Thesis writing uses normative juridical research methods and qualitative normative analysis methods. Collection techniques are using legislation, books, scientific works, encyclopedias and the internet. Conclusions of the study are 1) Criminal sanctions against environmental pollution have been regulated in Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management, In addition to the existence of PERMA Number 13 of 2016 article 3 in line with UUPPLH article 116 jo 117 it is necessary to remember that judges in implementing the decision must be grounded in the UUPPLH so that in the event of pollution both the perpetrators are corporations and individuals are explicitly regulated in the UUPPLH. so the sanctions are expected to be balanced with the impact and loss suffered due to pollution carried out. In this case PT. Nuryeni was only given a sanction in the form of a fine of Rp. 150,000,000.00 (One Hundred Fifty Million Rupiah). 2) As for the liability based on Vicarious Liability applied to the corporation where the defendant is the person who for or on behalf of the company that is polluting, in this case Usan Samsudin as the director of PT. Nuryeni was legally proven to have deliberately carried out dumping of waste into the public area without a permit so that PT. Nuryeni was subjected to coercive sanctions in the form of establishing a Temporary Storage Facility (TPS) for storing waste and remediation.

Keywords: Law Enforcement, Pollution, Hazardous and Toxic Waste (B3)